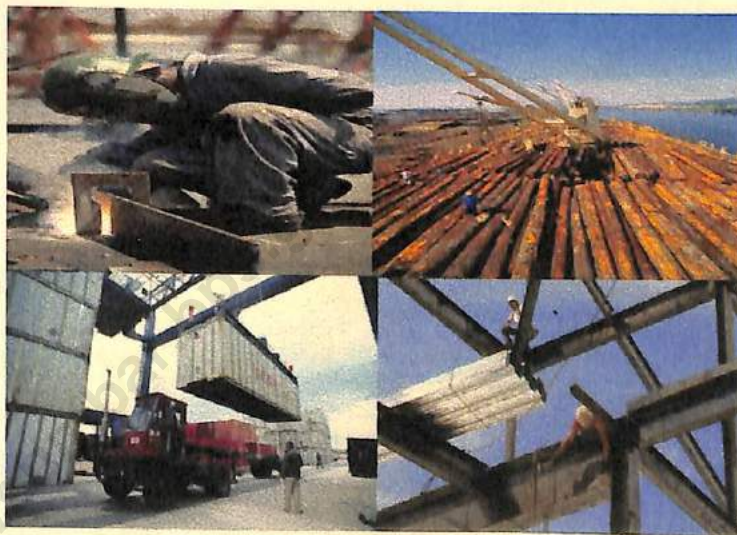




Ringkasan Eksekutif

INFORMASI KETENAGAKERJAAN 1996



BPS

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat



Ringkasan Eksekutif

**INFORMASI
KETENAGAKERJAAN
1996**



KATA PENGANTAR

Dalam usaha memanfaatkan hasil Susenas 1996 agar dapat memberikan kegunaan yang lebih nyata bagi pembangunan di bidang kependudukan, Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat memandang perlu untuk melakukan analisa yang berbentuk Ringkasan Eksekutif Informasi Ketenagakerjaan, dengan harapan dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan di Sumatera Barat.

Ringkasan Eksekutif ini merupakan suatu informasi bagi mereka yang bergerak dalam bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, serta mereka yang mempunyai minat terhadapnya. Terlebih lagi minat masalah ketenagakerjaan telah berkembang dengan cepat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bersikap tanggap terhadap suatu masalah penting yang dihadapi oleh bangsanya sendiri.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan ini, dan seluruh pengguna data kami ucapkan terima kasih. Akhirnya kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan dimasa mendatang sangat kami harapkan.

Padang, Januari 1998

**Badan Pusat Statistik
Propinsi Sumatera Barat
Kepala**

Drs. Armuni Umar
NIP. 340003737

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan.....	1
II. Pendudukan Usia Kerja	2
II. 1. Komposisi Penduduk.....	2-3
II.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	3-7
III Angkatan Kerja.....	8-11
IV Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	12
IV.1. Lapangan Usaha.....	12-13
IV.2. Status Pekerjaan.....	13-15
V Setengah Pengangguran.....	16-18
(Ringkasan Data).....	19
Daftar Pustaka	20-21

1. PENDAHULUAN

Untuk perencanaan masalah ketenagakerjaan sangat dibutuhkan data yang dapat dipercaya dan cukup terperinci mengenai karakteristik angkatan kerja dan struktur penyebaran tenaga kerja. Sampai saat ini sumber data yang dapat memberikan informasi ketenagakerjaan yang lebih rinci dengan ruang lingkup yang cukup luas adalah yang telah dikelola oleh BPS, yaitu melalui Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Tidak semua data dari sumber-sumber tersebut dapat dibandingkan dalam melihat perkembangan dan perubahan partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan dalam konsep dan definisi serta tidak keseragaman dalam klasifikasi.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia terlihat cukup lengkap dibanding dengan negara berkembang lainnya. Sejak dasawarsa 1970 - an, yaitu Sensus Penduduk 1971 telah diperkaya dengan data ketenagakerjaan.

SUMBER DATA YANG DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI KETENAGA KERJAAN ANTARA LAIN, MELALUI SENSUS PENDUDUK (SP), SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS (SUPAS), SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) DAN SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS).

Selain itu karakteristik ketenagakerjaan ini juga dikumpulkan dalam beberapa waktu melalui Susenas yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahunnya.

Dengan menggunakan data Susenas tersebut fenomena ketenagakerjaan telah banyak dikupas dalam surat-surat kabar, di dalam forum terbatas oleh ahli-ahli di BPS dan dibahas oleh sarjana asing. Namun, masih terasa jarang tulisan-tulisan berdasarkan analisa data sekunder yang memusatkan perhatian dalam masalah-masalah ketenagakerjaan dan membahasnya secara mendalam di tiap-tiap daerah propinsi.

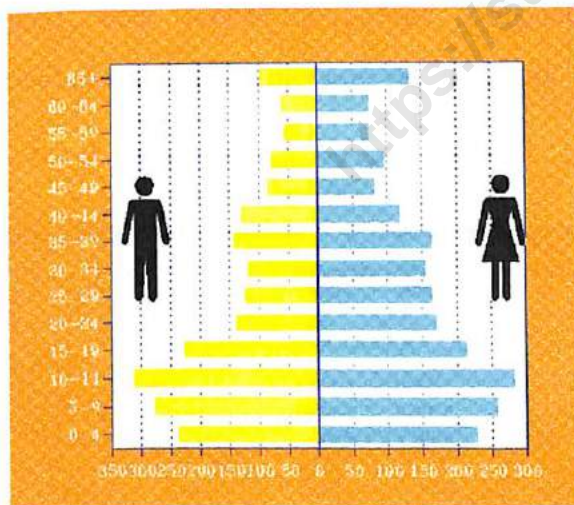
Ringkasan Eksekutif Informasi Ketenagakerjaan ini tujuannya untuk mengisi kekosongan itu dengan memakai data Susenas 1996 antara lain seperti kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, lapangan kerja, status pekerjaan, jam kerja.

2. PENDUDUK USIA KERJA

2.1. Komposisi Penduduk Usia Kerja

Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai 14 daerah Tk.II, merupakan salah satu propinsi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Menurut hasil Susenas 1995 jumlah penduduk Sumatera Barat sebesar 4.273.693 jiwa, sedang dari hasil Susenas 1996 sebesar 4.330.785 jiwa dengan laju pertumbuhan sekitar 1,34 %.

Gambar 2.1 :
Piramida Penduduk Sumatera Barat, 1996



Kesan pertama yang cukup menarik dari Gambar 1, yaitu gambaran komposisi penduduk menurut jenis kelamin terlihat berimbang untuk setiap kelompok umur. Persentase penduduk laki-laki sebesar 48,62 %

JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN LEBIH BESAR PADA KELOMPOK USIA MENENGAH

dan perempuan 51,38 %. Terlihat perbedaan yang kecil pada umur-umur tertentu, misalnya persentase laki-laki lebih tinggi pada kelompok umur muda (0 - 14 tahun), sebaliknya persentase perempuan lebih tinggi pada kelompok umur menengah (15 - 49). Selain itu untuk keperluan pengumpulan data statistik, batasan usia kerja yang berlaku adalah 10 tahun. Batasan itu sebenarnya tidak sejalan dengan peraturan atau kebutuhan perundang-undangan berbagai bidang lainnya seperti bidang ketenagakerjaan (15 tahun) dan bidang kesejahteraan anak. Batasan 10 tahun, sebenarnya juga tidak sejalan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang baru saja dicanangkan pemerintah. Walaupun demikian penetapan usia kerja 10 tahun juga, di lain pihak, menguntungkan karena dimungkinkan diperoleh data pekerja atau buruh anak yaitu pekerja yang menurut definisi ILO berumur kurang dari 15 tahun.

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa jumlah

penduduk usia kerja meningkat dari tahun 1995 - 1996, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia kerja bertambah dari 3,27 juta jiwa pada tahun 1995 menjadi sekitar 3,33 juta jiwa pada tahun 1996 atau tumbuh sekitar 1,64 %. Sebagai perbandingan, laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan dalam kurun waktu yang sama lebih rendah yaitu 1,34 % . Relatif cepatnya laju pertumbuhan penduduk terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan struktur umur penduduk Sumatra Barat dalam kurun waktu tersebut.

Jika diperhatikan Tabel 2.1 secara seksama maka akan tampak perbedaan komposisi penduduk usia kerja menurut jenis kelamin.

Tabel 2.1 :
Komposisi Penduduk Usia Kerja
Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin/ Jenis Kegiatan	Banyaknya (000)		Kenaikan 1995-1996 [(3)-(2)] (3) x 100
	1995	1996	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Laki-laki			
1.1. Angkatan Kerja	1064.9	1070.3	0.51
- Bekerja	1029.4	1033.4	0.39
- Mencari Kerja	35.5	36.9	3.94
1.2. Bukan Angkatan Kerja	491.9	518.6	5.43
- Sekolah	368.2	384.8	4.51
- Mengurus Rt	7.2	4.2	-41.67
- lainnya	116.5	129.6	11.24
Total	1556.8	1588.9	2.06
2. Perempuan			
2.1. Angkatan Kerja	757.7	746.5	-1.48
- Bekerja	706.9	708.8	0.27
- Mencari Kerja	50.8	37.7	-25.79
2.2. Bukan Angkatan Kerja	958.4	991.3	3.43
- Sekolah	398.7	381.7	-4.26
- Mengurus Rt	443.4	490.7	10.67
- lainnya	116.3	118.9	2.24
Total	1716.1	1737.8	1.26

**LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
USIA KERJA CUKUP TINGGI,
YAITU SEKITAR 1,64 PERSEN.**

Pertama jumlah penduduk usia kerja ternyata lebih besar untuk wanita dari pada laki-laki. Ini terjadi pada tahun 1995 maupun 1996. Kedua, kelompok angkatan kerja, yaitu mereka yang tergolong "bekerja" atau "mencari" pekerjaan, ternyata jauh lebih tinggi untuk laki-laki dari pada untuk wanita. Pada tahun 1996, misalnya, angkatan kerja laki-laki mencapai 1070,3 ribu jiwa atau 67,36 % dari penduduk usia kerja laki-laki, sementara jumlah angkatan kerja wanita hanya 746,5 ribu jiwa atau 42,96 % dari penduduk usia kerja wanita. Relatif rendahnya proporsi tersebut (atau TPAK) untuk wanita terjadi karena proporsi yang mengurus rumah tangga bagi mereka relatif sangat tinggi pada tahun 1996 mencakup 28,24 % dari keseluruhan penduduk usia kerja wanita. Sebagai perbandingan proporsi tersebut untuk laki-laki pada tahun yang sama kurang dari 1 %.

2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga Kerja (Man Power) merupakan unsur utama di dalam proses produksi barang dan

jasa serta mengatur sarana produksi untuk menghasilkan sesuatu. Anggapan ini didasarkan pada asumsi bahwa karena manusialah yang dapat menggerakkan suatu kombinasi semua sumber - sumber produksi tersebut untuk menghasilkan barang (Simanjuntak, P.J. 1981).

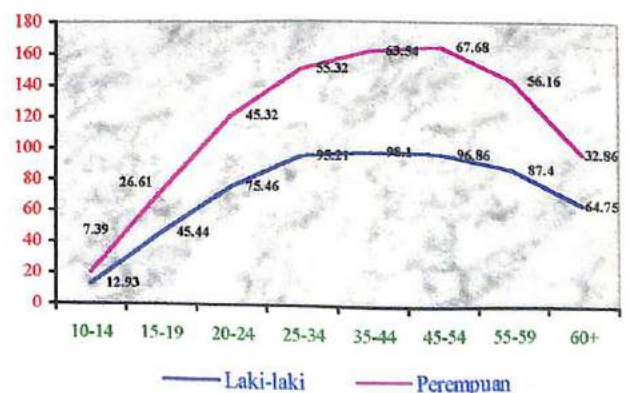
Perlu diingat bahwa istilah partisipasi angkatan kerja berbeda dengan istilah partisipasi kerja. Partisipasi angkatan kerja berarti keikutsertaan dalam atau menjadi angkatan kerja. Jadi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan kepada persentase jumlah penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja . Sebaliknya Partisipasi kerja berarti keikutsertaan dalam atau mempunyai pekerjaan (Employment Rate).

TPAK biasanya rendah untuk kelompok usia muda, kemudian naik secara bertahap sejalan dengan kenaikan umur, sebelum akhirnya turun karena pengaruh usia lanjut . Pola umum seperti itu juga berlaku di Sumatra Barat sebagaimana tampak pada gambar 2.2. . Pada gambar itu tampak bahwa TPAK relatif lebih sangat rendah pada kelompok usia 10 - 14 tahun . Hal ini dapat dipahami karena

TPAK RELATIF SANGAT RENDAH PADA KELOMPOK USIA 10 - 14 TAHUN.

penduduk pada usia ini sebagian besar masih berstatus sekolah tanpa melakukan kegiatan ekonomi sama sekali . Sebagai catatan, anak yang berstatus sekolah tetapi melakukan kegiatan ekonomi paling sedikit satu jam dalam seminggu, perdefinisi akan tergolong sebagai angkatan kerja. Gambar 2.2. memperlihatkan bentuk huruf " U " terbalik. Pola U terbalik sangat selaras dengan hipotesa tentang siklus penghidupan (life cicle), yakni manusia pada awal usianya kurang produktif, demikian pula pada waktu usia lanjut, akibatnya mereka tidak sempat mempunyai tabungan,

Gambar 2.2.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Umur dan Jenis Kelamin



sebaliknya pada usia menengah manusia itu sangat produktif sehingga mempunyai pendapatan yang tinggi dan tabungan yang positif.

Seperti terlihat pada gambar 2.2. TPAK mengalami kenaikan cepat dari kelompok usia 10 - 14 ke usia 15 - 19 dan hal itu berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita. TPAK naik terus pada kelompok usia berikutnya sebelumnya mencapai puncaknya pada kelompok usia 35 - 44 tahun bagi laki-laki atau kelompok 45 - 54 bagi wanita. Sepertinya pola TPAK wanita lepas dari pengaruh masa-masa kemakmuran relatif sebelum anak-anaknya lahir dan sesudah anak-anaknya cukup untuk mencari nafkah sendiri. Pola semacam itu wajar untuk diharapkan karena selama masa usia sebelum 45 tahun mereka sibuk memelihara dan membesarkan anak, sedangkan setelah usia 45 tahun anak telah dewasa untuk melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena ada masa-masa tertentu bagi wanita mempunyai kecenderungan untuk keluar dari angkatan kerja, paling tidak untuk sementara waktu.

**RENTANG TPAK MENURUT DATI II
TERLETAK ANTARA 43,93 PERSEN
S.D. 66,08 PERSEN.**

Tabel 2.2. memberikan informasi tentang angkatan kerja Sumatra Barat menurut daerah Tk.II, yang menunjukkan adanya variasi TPAK yang nyata pada masing-masing daerah Tk.II. Rentang TPAK terletak antara 43,93 % untuk Kotamadya Padang dan 66,08 % untuk Kabupaten Pasaman. Tingginya TPAK di Kabupaten Pasaman terjadi antara lain karena secara tradisional wanita di Pasaman,

Tabel 2.2 :
Persentase Angkatan Kerja menurut Daerah Tk.II dan
Jenis kegiatan Utama

Daerah Tingkat II	Bekerja	Mencari Kerja	TPAK
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
01. Pesisir Sel	45.60	2.29	47.89
02. Solok	60.45	0.67	61.12
03. Swl./Sjj	61.20	1.40	62.60
04. Tanah Datar	51.34	2.64	53.98
05. Pdg. Pariaman	49.79	1.62	51.41
06. Agam	53.67	1.61	55.28
07. Limapuluh Kt.	59.60	1.32	60.92
08. Pasaman	64.92	1.16	66.08
Kotamadya			
71. Padang	39.02	4.91	43.93
72. Solok	46.71	2.57	49.28
73. Sawahlunto	47.07	2.99	50.06
74. Pdg. Panjang	52.10	2.93	55.03
75. Bukittinggi	51.46	2.50	53.96
76. Payakumbuh	50.92	3.43	54.35
Sumatera Barat	52.37	2.24	54.61

kegiatannya agak berbeda dengan wanita di luar Kabupaten Pasaman, mereka terbiasa untuk bekerja terutama di sektor pertanian seperti perkebunan, suatu kebiasaan yang jelas berdampak terhadap TPAK secara keseluruhan di kabupaten tersebut.

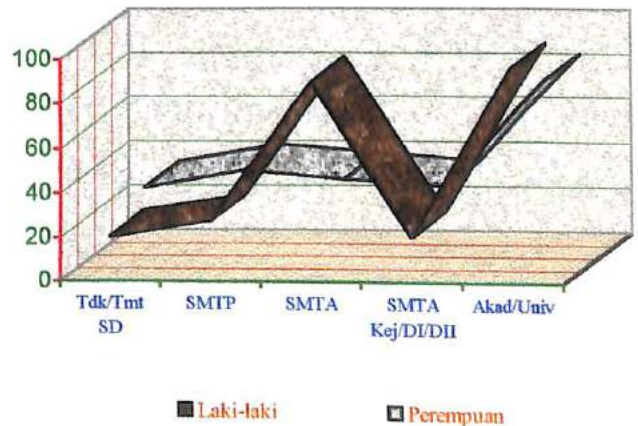
Rendahnya TPAK di Kotamadya Padang tampaknya lebih sukar untuk di jelaskan apalagi jika diingat bahwa "tingkat kemakmuran" penduduk dati II tersebut cukup tinggi dan lapangan kerja di luar sektor pertanian sangat beragam. Secara spekulatif gejala itu barang kali dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dengan tingkat kemakmuran yang cukup tinggi (walaupun tidak merata) cukup besar proporsi penduduk usia muda yang masih berstatus sekolah (termasuk kuliah atau walaupun tidak, mereka masih "mampu" untuk menganggur karena memperoleh dukungan ekonomi orang tua). Kedua, lapangan pekerjaan formal diluar sektor pertanian umumnya membutuhkan pendidikan atau keterampilan yang tinggi, pada hal suatu tuntutan yang belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh kualitas penduduk Kota - madya Padang . Alternatif lapangan pekerjaan yang tersedia disektor informal yang tentunya relatif lebih sukar dimasuki dari pada lapangan kerja di sektor pertanian terutama bagi wanita.

SEMAKIN TINGGI TINGKAT PENDIDIKAN, SEMAKIN TINGGI TPAK - NYA.

Jadi masalahnya berkaitan dengan struktur lapangan yang tersedia.

Pada gambar 2.3 memperlihatkan bahwa secara umum TPAK berkaitan positif dengan tingkat pendidikan ; semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi TPAK . Hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita. Lebih rendahnya TPAK bagi yang "tidak/tamat SD" dari pada TPAK bagi yang "tamat SMTA" mungkin berkaitan dengan perbedaan perilaku mereka dalam menerima pekerjaan.

Gambar 2.3 :
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin



Mereka yang "tidak/tamat SD" mungkin lebih bebas dari pada mereka yang "tamat SMTA" dalam hal menerima pekerjaan yang tersedia tanpa terlalu mengganggu perasaan gengsi mereka .

Gambar 2.3 juga memperlihatkan bahwa TPAK lulusan sekolah kejuruan lebih tinggi dari pada TPAK lulusan sekolah umum untuk

jenjang yang sama, suatu keadaan yang tidak mengherankan mengingat bahwa sekolah kejuruan memang lebih diarahkan untuk memasuki dunia kerja dari pada sekolah umum. Pola itu berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita.

<https://sumbar.bps.go.id>

3. ANGKATAN KERJA

Masalah ketenagakerjaan masih merupakan topik utama dalam pembicaraan baik ditingkat nasional maupun di tingkat regional. Penetapan wanita sebagai mitra sejajar pria mengisyaratkan bahwa wanita mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki termasuk kesempatan dalam bekerja.

Tabel 3.1 memperlihatkan adanya perbedaan komposisi penduduk yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja lebih besar untuk wanita dari pada untuk laki-laki, sedangkan kelompok angkatan kerja, yaitu mereka yang tergolong "bekerja" atau "mencari" pekerjaan, ternyata jauh lebih tinggi untuk laki-laki dari pada untuk perempuan. Jumlah penduduk angkatan kerja laki-laki mencapai 1,1 juta jiwa, sementara jumlah angkatan kerja wanita hanya 0,7 juta jiwa.

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa dari 1,8 juta penduduk angkatan kerja 95,89 % adalah penduduk yang bekerja. Penyerapan tenaga kerja terbesar adalah pada tingkat pendidikan

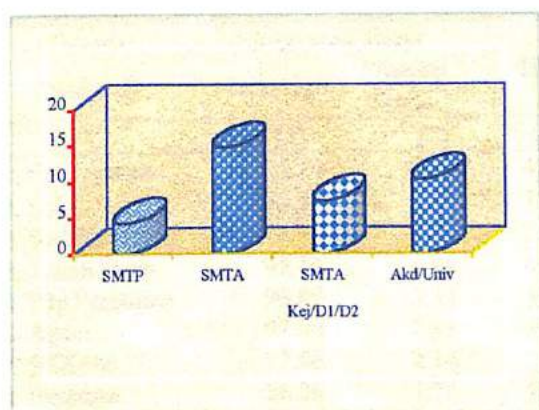
PROPORSI ANGKATAN KERJA BAGI WANITA RELATIF RENDAH, YAITU 42,96 %.

Tabel 3.1 :
Penduduk Usia 10 tahun keatas menurut jenis
Kegiatan dan jenis Kelamin, 1996 (x1000)

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1. Angkatan Kerja Bekerja	1070.3	746.5	1816.8
Mencari Kerja	1033.4	708.8	1742.2
	39.9	37.7	74.6
2. Bukan Angkatan Kerja	518.6	991.3	159.9
Sekolah	384.8	38.17	766.5
Mengurus Rmtg	4.2	490.7	494.9
Lainnya	129.6	118.9	248.5
Jumlah	1588.9	1737.8	3326.7

SD/tidak tamat SD, yaitu sebanyak 1,1 juta atau sebesar 64,95 %. Bagi lulusan Akademi/Universitas yang bekerja hanya sebesar 3,61 %. Hal ini menunjukkan suatu gambaran , bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka dia akan lebih memilih pekerjaan yang disenangi. Lain halnya dengan seseorang yang berpendidikan

Gambar 3.1 :
Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Pendidikan, 1996



rendah, untuk mendapatkan suatu pekerjaan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dengan perkataan lain mau menerima pekerjaan apapun asalkan mendapat penghasilan.

Selain penduduk bekerja, yang termasuk ke dalam Angkatan Kerja adalah yang mencari pekerjaan. Pencari kerja terbesar berpendidikan SLTA, yakni 23,3 ribu (31,3 %) kemudian diikuti dengan pendidikan SD ke bawah sebesar 19.6 ribu (26,3 %).

Selain dari pada itu Gambar 3.1 memperlihatkan juga angka pengangguran terbuka, yaitu proporsi antara penduduk yang tergolong mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja, pada tahun 1996 sekitar 4,11 %. Tingkat pengangguran terbuka cenderung lebih tinggi

**JUMLAH PENCARI KERJA
TERTINGGI ADALAH PADA
TINGKAT PENDIDIKAN SMTA.**

dengan naiknya tingkat pendidikan. Angka untuk lulusan SMTA ternyata paling tinggi yaitu 14,72 %.

Hal itu dapat dipahami karena penduduk lulusan ini, pada umumnya merasa bergensi untuk menerima sembarang pekerjaan, padahal di lain pihak, pasar kerja dipeluang kerja sektor formal non pertanian yang bergensi tidak tersedia bagi mereka.

Pada tabel 3.2 terlihat gambaran tentang Angkatan Kerja Sumatera Barat menurut daerah tingkat II, yang merupakan adanya variasi yang nyata pada masing-masing daerah tingkat II.

Tabel 3.2 :
 Persentase Angkatan Kerja
 Menurut Daerah Tingkat II, 1996

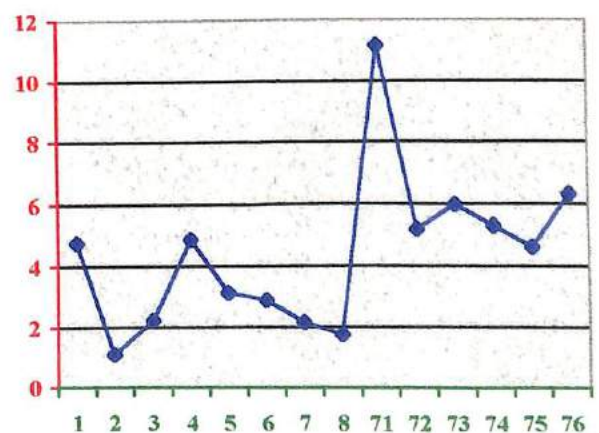
Daerah Tingkat II	Angkatan Kerja Bekerja	Kerja Mencari Kerja	TPT
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pss. Selatan	95.20	4.80	4.79
02. Solok	98.90	1.10	1.09
03. Swl/Sijunjung	97.74	2.26	2.24
04. Tanah Datar	95.16	4.84	4.88
05. Pdg.Pariaman	96.89	3.11	3.14
06. Agam	97.09	2.91	2.90
07. 50 Kota	97.86	2.14	2.17
08. Pasaman	98.26	1.74	1.76
71. Padang	88.85	11.15	11.17
72. Solok	94.54	5.46	5.22
73. Sawahlunto	93.98	6.02	5.98
74. Pdg. Panjang	94.22	5.78	5.32
75. Bukittinggi	95.36	4.64	4.63
76. Payakumbuh	93.69	6.31	6.31
Sumatera Barat	95.88	4.12	4.11

Persentase penduduk bekerja tertinggi terdapat di Kabupaten Solok yaitu 98,90 %, kemudian di susul Kabupaten Pasaman sebesar 98,26 %. Sebaliknya dengan Kotamadya Padang yang merupakan ibukota propinsi, persentase penduduk yang bekerja hanya 88,85 %, merupakan persentase terendah di 14 daerah tingkat II. Hal ini dimungkinkan adanya batas usia kerja di Kotamadya Padang (misalnya larangan penggunaan tenaga kerja dibawah umur dan peraturan usia pensiun). Selain itu dengan berkembangnya industri dan perdagangan di Kotamadya Padang menuntut

PERSENTASE PENDUDUK BEKERJA DI KABUPATEN LEBIH TINGGI DIBANDING DAERAH KOTAMADYA.

tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu dan tentunya memerlukan waktu yang cukup lama. Sepertinya tidak berbeda dengan pendapat Durand (1975) dan United Nations (1962) yang menyatakan bahwa semakin maju suatu negara semakin tinggi minimum usia kerja dan semakin rendah usia pensiun.

Gambar 3.2 :
 Tingkat Pengangguran Terbuka
 Menurut Daerah Tingkat II, 1996



Sementara itu bagi pencari kerja nampak bahwa di daerah kabupaten lebih kecil dari daerah kotamadya. Kabupaten Solok dengan persentase pencari kerjanya terendah diduga masih banyak yang bekerja di sektor pertanian. Dan tentunya sangat kecil sekali pengaruh adanya batas minimum dan maksimum usia kerja, sehingga pemanfaatan sumber daya

manusianya sangat tinggi ; sebaliknya dengan Kotamadya Padang yang persentase mencari kerjanya tinggi sehingga membuat adanya banyak pengangguran terbuka. Karena memang di daerah pusat pemerintahan, seperti Kotamadya Padang pemilihan tenaga kerjanya lebih selektif, yang akhirnya berpengaruh terhadap pengangguran terbuka.

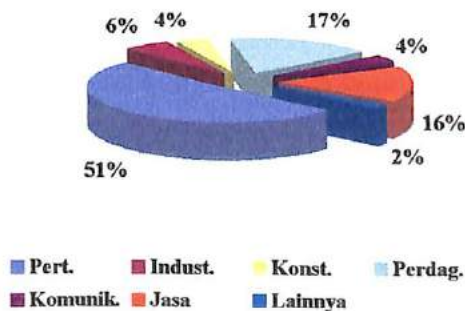
<https://sumbar.bps.go.id>

4. LAPANGAN USAHA DAN STATUS PEKERJAAN

4.1 Lapangan Usaha

Pembagian penduduk yang bekerja dan perkembangannya dari masa ke masa menurut sektor sering dianalisa dengan membedakan tiga sektor pokok : Sektor A (pertanian), sektor M pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi) dan sektor S (perdagangan, komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya). Menurut beberapa teori ekonomi proses pembangunan biasanya disertai dengan perpindahan tenaga kerja dari Sektor A ke Sektor M dan S.

Gambar 4.1
Persentase Penduduk yang Bekerja
menurut Lapangan Usaha



PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR PERTANIAN LEBIH TINGGI PROPORSINYA.

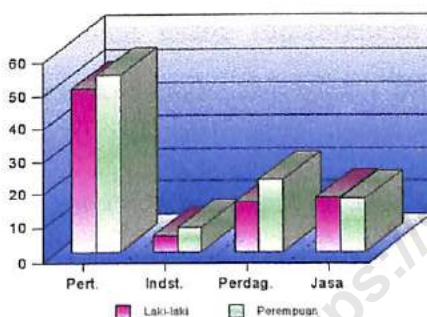
Keberhasilan strategi pembangunan sering dikaitkan dengan kecepatan pertumbuhan sektor M yang dianggap erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas angkatan kerja.

Salah satu ciri dari negara berkembang antara lain, lapangan usahanya masih dominan di sektor A (pertanian). Seperti terlihat pada gambar 4.1, lebih dari 50 % bekerja di sektor pertanian. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa sekitar 17 % dan sektor industri sekitar 6 %.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Squire (1981) bahwa dalam sejarah perkembangan negara-negara maju didapatkan pola bahwa sektor pertanian semakin menurun yang kemudian diimbangi oleh peningkatan peranan sektor industri dan jasa. Pada tahap selanjutnya menurut Galenson (1963) sektor jasa semakin kuat perannya untuk menggeser peranan sektor industri.

Hal yang menarik lagi jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada Gambar 4.2, ternyata persentase wanita lebih besar dibanding laki-laki terutama sekali pada ke-4 sektor (pertanian, industri, perdagangan dan jasa). Keadaan ini besar kemungkinan adanya budaya merantau pada masyarakat Minangkabau terutama sekali pada penduduk laki-laki.

Gambar 4.2:
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Lapangan Usaha



Tingginya persentase wanita dari pada laki-laki di sektor pertanian sejalan dengan bahasan sebelumnya yakni tingginya angka setengah pengangguran pada wanita yang diduga sebagai pekerja keluarga. Hal ini berarti jika si suami sebagai petani maka praktis si istri juga bekerja di bidang pertanian. Namun demikian sektor industri yang justru banyak menyerap tenaga kerja wanita, karena berkembangnya industri-industri yang dalam proses

PERSENTASE WANITA YANG BEKERJA DI SEKTOR PERTANIAN LEBIH TINGGI DI BANDING LAKI-LAKI

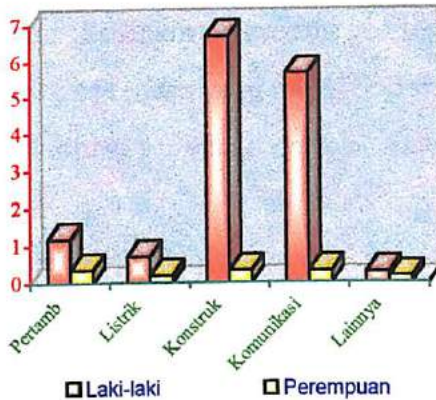
produksinya justru mengutamakan tenaga kerja wanita, misalnya industri makanan, minuman, farmasi, tekstil, konveksi dan sebagainya. Kendatipun demikian tenaga kerja laki-laki lebih tinggi persentasenya.

Nampaknya tenaga kerja wanita Sumatera Barat berangsur mengimbangi peranannya terutama sekali pada sektor industri dan jasa, seiring dengan mulai tumbuhnya industri pada perusahaan jasa yang memberikan prioritas terhadap tenaga kerja wanita.

4.2. Status Pekerjaan

Penelaahan status pekerjaan diprediksikan cukup relevan untuk melihat tingkat pembangunan suatu daerah (Oberai, 1978). Cukup beralasan bilamana status pekerjaan *berusaha dengan buruh tetap dan buruh atau karyawan* dianggap sebagai proxy dari pekerjaan berubah (wage employment) yang dapat dikatakan sebagai indikator sektor modern.

Gambar 4.3 :
Persentase Penduduk Yang Bekerja
Menurut 5 Jenis Lapangan Usaha



Persamaan lapangan pekerjaan anak dan orang tua merupakan indikasi bahwa mereka bekerja disuatu usaha rumahtangga yang dapat mewakili kegiatan-kegiatan informal tetapi ada

berbagai variabel yang dapat dipakai sebagai proxy yang mengenali kegiatan tersebut. Di lain pihak Bhalla (1973 : 288) memperkirakan pekerjaan upahan sebagai pekerja sektor modern dan sebaliknya pekerja keluarga digolongkan sebagai pekerja sektor tradisional.

Maka wajarlah kiranya status *berusaha sendiri, berusaha dengan buruh tidak tetap atau anggota rumahtangga dan pekerja keluarga* disebut sebagai proxy kegiatan sektor informal.

PERSENTASE STATUS PEKERJAAN YANG TERTINGGI BAGI LAKI-LAKI YAITU BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP.

Berdasarkan Tabel 4.1 tampak bahwa penduduk laki-laki yang bekerja di sektor informal 68,76 %, lebih rendah dari pada penduduk perempuan yaitu sebesar 76, 41 %. Persentase yang tertinggi untuk laki-laki adalah mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap. Meskipun demikian mayoritas dari laki-laki mempunyai pekerjaan yang relatif modern yakni sebesar 31,25 %.

Tabel 4.1 :
Persentase Penduduk Yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Sektor Informal</u>			
- Berusaha Sendiri	25.52	20.54	23.49
- Berusaha dibantu Buruh tdk tetap	31.61	18.64	26.33
- Pekerja Keluarga	11.62	37.24	22.05
<u>Sektor Modern</u>			
- Berusaha dibantu Orang lain	1.77	0.55	1.27
- Buruh / Karyawan	29.48	23.03	26.86

Proporsi penduduk yang bekerja sebagai buruh atau karyawan lebih didominasi oleh laki-laki daripada perempuan. Sebaliknya mayoritas perempuan mempunyai pekerjaan yang relatif tradisional (sektor informal), yakni sebagai pekerja

keluarga dengan persentase sebesar 37,24%. Dari sini dapat diasumsikan bahwa rata-rata anak perempuan banyak yang bekerja mengikuti jejak orang tuanya, seperti jadi petani atau pedagang dan lainnya.

<https://sumbar.bps.go.id>

5. SETENGAH PENGANGGURAN

Pengangguran terbuka, setengah pengangguran dan produktivitas rendah merupakan segi-segi pemanfaatan tenaga kerja kurang (under utilization) di negara-negara berkembang (Jones, 1976).

Di dalam menyoroti setengah pengangguran (under employment), gejala ini timbul biasanya karena adanya ketidak seimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu yang menimbulkan " excess supply of labor, " yakni disuatu lapangan pekerjaan jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk dipekerjakan lebih banyak dibanding dengan jumlah orang yang diminta untuk bekerja. Akibat dari keadaan ini seseorang bisa bekerja kurang dari jam kerja atau hari kerja yang dapat dikerjakannya, serta ada keinginan untuk bekerja lebih banyak.

Konsep dan definisi yang sering dipakai untuk setengah pengangguran adalah seseorang yang bekerja kurang dari jam kerja normal, yakni 35 jam seminggu dan ingin menambah jam kerja.

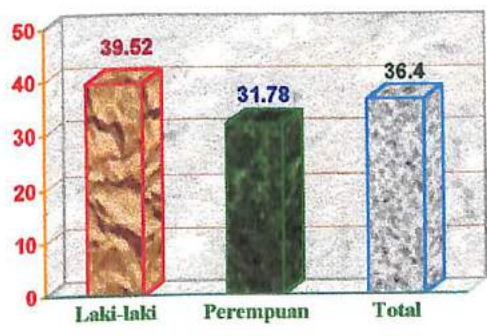
RATA-RATA JAM KERJA SELAMA SEMINGGU BAGI WANITA DI BAWAH JAM KERJA NORMAL, YAITU 31,78 JAM.

Sebenarnya istilah ini tidak tepat karena untuk dikatakan setengah pengangguran, selain memiliki jam kerja di bawah normal, juga melakukan hal itu karena bukan atas kemauan sendiri. Seseorang pekerja yang walaupun memiliki jam kerja rendah, katakanlah 10 jam per minggu, tetapi itu dilakukan atas kemauan sendiri, bukan setengah pengangguran. Walaupun demikian karena data yang tersedia mengenai jam kerja tidak dapat dibedakan menurut alasan memiliki jam (atas kemauan sendiri atau terpaksa), maka, untuk mudahnya dapat dianggap bahwa penduduk yang memiliki jam kerja rendah sebagai "setengah pengangguran" (di dalam tanda kutip). Terdapat usaha untuk merevisi definisi tersebut agar lebih realistis dengan kondisi kita. Dalam definisi baru ini diintrodusir jam kerja normal,

untuk sektor pertanian 36 jam seminggu, sedang untuk non pertanian 48 jam seminggu. Berdasarkan dari besaran jam kerja normal tersebut tenaga kerja diklasifikasikan atas pekerja penuh dan pekerja tidak penuh, dipihak lain terdapat pengangguran penuh dan pengangguran tidak penuh (Depnaker dan Transmigrasi, 1982).

Hasil pengolahan Susenas 1996 ditemukan rata-rata jam kerja selama seminggu yang lalu sebesar 36,40 jam, dengan rincian untuk laki-laki sebesar 39,52 jam, lebih tinggi dibanding perempuan sebesar 31,78 jam (lihat Gbr. 5.1). Secara rata-rata penduduk perempuan masih belum bisa bersaing dengan laki-laki yang bekerja sudah di atas jam kerja normal.

Gambar 5.1 : Rata-rata Jam Kerja Selama Seminggu yang lalu



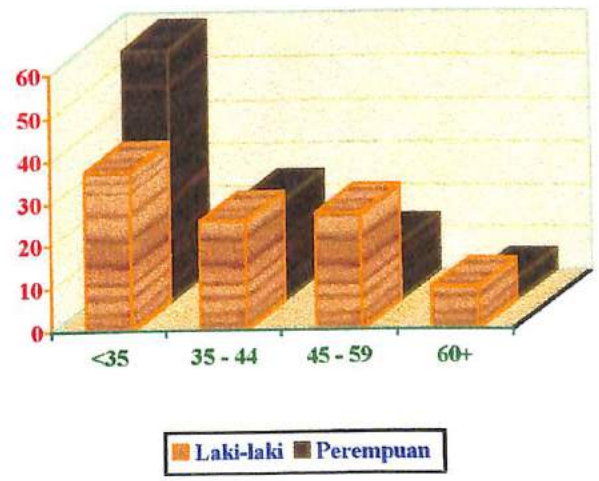
Selanjutnya untuk lebih jelas lagi dilihat besarnya setengah pengangguran (gambar 5.2)

TINGGINYA ANGKA SETENGAH PENGANGGURAN PADA PEREMPUAN DIDUGA KARENA BANYAK YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA KELUARGA.

proporsi untuk perempuan sebesar 58,37 % lebih besar dibanding laki-laki yakni 37,43 %.

Tingginya angka setengah pengangguran pada perempuan, diduga banyak yang bekerja sebagai pekerja keluarga (unpaid family worker).

Gambar 5.2 : Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya



Bila dihubungkan dengan pengukuran Depnaker mengenai jam kerja normal untuk sektor non pertanian 48 jam seminggu dan sektor pertanian 36 jam seminggu, nampaknya

untuk jam kerja 35 - 44 jam perbedaannya tidak begitu nyata, namun untuk jam kerja 45 - 49 jam terlihat perbedaan yang cukup tajam antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga untuk mereka yang bekerja sangat panjang (60 jam lebih) tetap didominasi oleh laki-laki, namun tidak mudah dipahami bila dihubungkan dengan pendapatan yang diperoleh.

pekerjaan marginal, intensitas kerja dan produktivitas kerja per jam sangat rendah, pendapatan rendah dan hanya dapat diperoleh melalui jam kerja sangat panjang.

Sebagai contoh dikemukakan pedagang kaki lima, penjual keliling, tukang becak, pembantu rumah tangga dan sebagainya, yang hampir sebagian besar di daerah kota dengan pendapatan rendah tetapi jam kerja panjang.

<https://sumbar.bps.go.id>

Dalam hal ini Jones (1976) menyatakan bahwa

RINGKASAN DATA

Data Penduduk Sumatera Barat 1996	Susenas	Proyeksi
Laki-laki (ribuan)	2.105,6	2.156,2
Perempuan (ribuan)	2.225,2	2.233,8
Total (ribuan)	4.330,8	4.390,0
Laju Pertumbuhan Penduduk 1995-1996 (%)	1,34	1,46
Penduduk Usia Kerja (10 Tahun keatas)		
Laki-laki (ribuan)	1.588,9	1.650,1
Perempuan (ribuan)	1.737,8	1.743,2
Total (ribuan)	3.326,7	3.393,3
Penduduk Angkatan Kerja		
Laki-laki (%)	1.070,3	1.063,3
Perempuan (%)	746,5	736,9
Total (%)	1.815,8	1.800,2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Laki-laki (%)	67,36	64,44
Perempuan (%)	42,96	42,28
Total (%)	54,62	53,05
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
Laki-laki (%)	3,45	-
Perempuan (%)	5,05	-
Total (%)	4,11	-
Setengah Pengangguran		
Laki-laki (%)	37,43	-
Perempuan (%)	58,37	-
Total (%)	45,94	-

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 1995 Profil Kependudukan Indonesia Berdasarkan Data SUPAS 1995, Jakarta.

Badan Pusat Statistik (Kantor Statistik Propinsi Sumatera Barat), 1997, Survei Sosial Ekonomi Nasional 1996, Sumatera Barat.

Clark, C, 1940, The Conditions of Economic Progress, London, Mac Milan.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, 1982, Resume Beberapa Hasil Penelitian di Bidang Ketenagakerjaan, Jakarta.

Durand, J.D, 1975, The Labor Force in Economic Development: a Comparison of International Census Data 1964 - 1966. New Jersey, Princeton University Press.

Galenson, W, 1963, Economic Development and The Sectoral Expansion of Employment, International Labor Review, Vol 87 : 504 - 519.

Jones, G. dan B. Supratilah, 1976, Undertilization of Labor in Palembang and Ujung Pandang, Bulletin of Indonesia Economic Studies, 12 (2) : 30 - 57.

Kuznets, S, 1957, Quantitative Aspects of The Economic Growth of Nation : II Industrial Distribution of National Product and Labor Force, Economic Development and Cultural Change, 5 (4), Part 2 : 1 - 111.

Oberai, A.S, 1978, Changes in The Structure of Employment with Economic Development, Geneva, International Labor Office.

Simanjuntak, P.J, 1981, Ekonomi Tenaga Kerja, Jakarta . Naskah.

Squire, Lyn, 1981, *employment Policy in Developing Countries : a Survey of Issues and Evidence*, New York, Oxford University Press.

Turnham, D, 1971, *The Employment Problem in less Developed Countries : a Review of Evidence*. Paris, Organization for Economic Co-operation and Development Employment, series no. 1.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs.

1962, *Sex and Age patterns of Participation in Economic Activities*, New York, Demographic Aspects of Man Power Report no. 1.

1968, *Methods of Analyzing Census Data on Economic Activities of The Populations*, Chapter III. New York.

Ringkasan Eksekutif ini menyajikan tentang Informasi Ketenagakerjaan Sumatera Barat yang menggambarkan struktur dan kondisi ketenagakerjaan untuk pengambilan keputusan dan bahan penyusunan berbagai program. Dengan harapan dapat disajikan data ketenagakerjaan yang up to date, seperti : **Kondisi Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran, Lapangan Usaha, dan Status Pekerjaan.**

Ringkasan Eksekutif Informasi Ketenagakerjaan 1996 disiapkan oleh *Bidang Statistik Kependudukan Seksi Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat*. BPS Propinsi Sumatera Barat merupakan lembaga resmi yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan statistik di daerah, dengan tugas utamanya yakni menyediakan data bagi pemerintah dan masyarakat.

BPS

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 48, Telp. 442158 - 60
Fax. 442161, Padang - 25135
E-mail: bpssumbar@padang.wasantara.net.id
